

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2024



MEDAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam dokumen ini terdapat beberapa capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun kebelakang serta hal – hal apa yang akan dilakukan kedepannya. Untuk Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun ke 5 (kelima) atau tahun akhir pencapaian target visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2019 sd 2023 bergantung kepada pencapaian target dan realisasi dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi “ Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat” memiliki 5 (lima) misi didalamnya yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, ramah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga- harga yang terjangkau
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berkeprimanusiaan dan beradab

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan target untuk mencapainya dan ini tertuang dalam dokumen Perencanaan di masing – masing OPD baik itu Rencana Strategis ataupun Rencana Kerja setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 yang merupakan akhir dari perodesasi RPJMD diharapkan dapat tercapai demi terwujudnya Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Disamping berpedoman kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut, dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara juga mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam dokumen tersebut terdapat Program Prioritas yang tentunya harus disesuaikan dengan dokumen Perencanaan dimasing – masing OPD, demikian halnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Mulai Tahun Anggaran 2021 dalam Penyusunan Anggaran dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi ke seluruh wilayah, melalui sistem ini diharapkan adanya keseragaman penyusunan anggaran di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penyusunan anggaran tersebut juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini terdapat perubahan urusan seperti Kesbangpol yang tadinya masuk kedalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan menjadi Urusan Pemerintahan Umum.

1.2 Landasan Hukum

Didalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini terdapat beberapa landasan hokum yang menjadi pedoman yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104);
 - 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ;
 - 3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
 - 5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 6) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- 18) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;

- 19) Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
- 20) Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 21) Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
- 22) Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- 23) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 24) Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- 28) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- 29) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FPK Kab / Kota di Sumatera Utara;
- 30) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

31) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dasar perencanaan program / kegiatan yang akan ditampung pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya .

Selanjutnya untuk tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang pembuatan Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang Sistematika Penyusunan Renja. Adapun sub Bab ini terdiri dari :

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab II ini memuat hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi pada tahun lalu sehingga dapat diperoleh saran / masukan untuk perbaikan penyelenggaraan kinerja kedepan. Adapun sub Bab ini terdiri dari :

- Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD
- Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini dipaparkan tujuan / sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Sumatera Utara yang didukung dari program dan kegiatan yang telah disusun dengan melihat dan mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provsu. Data Evaluasi ini merupakan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja OPD dan Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2022 yang lalu.

Mulai Tahun Anggaran 2021 sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan pada Program / Kegiatan sebagai berikut:

- **Sekretariat**
Terdapat 1 Program yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan 6 (enam) Sub Program Kegiatan, dan 17 (tujuh belas) rincian kegiatan rutin dan seluruhnya terlaksana dengan baik.
- **Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**
Pada bidang ini terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN dengan 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya. Keseluruhan Kegiatan yang ada dimasukkan untuk mendukung pencapaian Indikator Presentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah 2000 orang dan untuk realisasinya 1450 orang atau 70% sedangkan Target tahun 2022 adalah 1275 Orang dengan realisasi sebanyak 1550 orang atau 100% tercapai .
- **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**
Pada bidang ini terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL dengan 2 (dua) sub kegiatan didalamnya. Keseluruhan Kegiatan yang ada dimasukkan untuk mendukung pencapaian Indikator

Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi dengan target peringkat 8 (delapan), namun peringkat Nasional hasil evaluasi periode Tahun 2021 Sumatera Utara berada pada Peringkat 15 atau tidak tercapai target, tetapi untuk Tahun 2022 tercapai sesuai target dengan peringkat 8.

- Bidang Politik Dalam Negeri

Terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK dengan 4 (empat) sub kegiatan didalamnya, target Perjanjian Kinerja Persentase Partisipasi pemilih sebesar 64 % dengan realisasi tetap seperti tahun 2020 di tahun 2021 yaitu 64,42 %, pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator yaitu menjadi Jumlah Pelopor Pemilih cerdas dengan target 425 orang dan tercapai 100% lebih yaitu 600 orang yang telah mengikuti rakor, sosialisasi dan pendidikan politik.

- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Terdapat 2 (dua) Program yaitu PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA dengan 2 (dua) sub kegiatan didalamnya dan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN dengan 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya. Tahun 2021 yang menjadi indikator masih berada pada target yang ditetapkan adalah 20 Ormas setiap tahunnya dengan indikator Persentase pertambahan ormas. Untuk realisasi pencapaian target pada tahun 2021 mencapai 370 % atau ada pertambahan menjadi sebesar 74 ormas, Tahun 2022 berubah indikator yaitu menjadi Jumlah Pembinaan Ormas aktif dengan target 40 ormas dan tercapai lebih 100% dengan jumlah 120 ormas yang aktif dan terbina. Sedangkan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdapat indikator baru di tahun 2022 yaitu Menahan Laju angka prevalensi pengguna narkoba di Sumut dengan pendidikan bahaya narkoba dengan target menjadi 5,9 % namun masih belum tercapai yaitu masih berada pada angka 6,5 % sejak tahun 2020.

Dari data yang ada, dapat dijelaskan bahwa dari total anggaran Badan Kesbangpol Provsu tahun 2021 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 38.130.532.164,- dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 36.861.012.764,- terdiri dari Belanja Pegawai

Rp. 10.430.932.924,-, Belanja Barang Jasa Rp. 17.138.811.440,- dan Belanja Hibah Rp. 9.291.268.400,-, serta Belanja Modal Rp. 1.249.519.400,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 34.848.473.440,- atau 91,44 % dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 33.636.706.290,- sedangkan belanja Modal sebesar Rp. 1.211.767.150,-. Pada Tahun 2022 Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 75.314.882.276,- atau 96,37 % dari total pagu anggaran Rp. 78.148.403.200,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022 masih diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terdapat Uraian tentang Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pelaksanaan tugas pembantu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Untuk Forum – Forum yang ada di Kesbangpol, dapat dijelaskan bahwa ada 4 yang ada di Kesbangpol Provsu. Untuk 3 Forum dimaksud adalah : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Pelestarian Budaya (FPB). Khusus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seluruh Kabupaten / Kota sudah membentuk Forum ini, untuk Forum yang lain masih ada beberapa kab/kota yang belum membentuknya.

Disamping Forum - Forum tersebut, sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota diwajibkan untuk membentuk Tim ini untuk :

1. Mengoptimalkan Pengembangan dan Pelaksanaan Nilai Kebangsaan guna Pemberdayaan dan Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan pada Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengoptimalkan Pengembangan dan Perbaikan Kinerja Demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia
3. Mengembangkan dan Melaksanakan Model PWK yang tidak Indoktrinatif dan sesuai dengan Kearifan Lokal
4. Memfasilitasi Proses Pembentukan Simpul PWK
5. Memberikan Usulan Perubahan Kebijakan yang terkait dengan masalah Kebangsaan; dan
6. Membangun Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak untuk Pengembangan PWK Tingkat Lokal, Nasional, dan Regional sesuai Peraturan Perundangan.

Atas hal tersebut diatas, dan mengingat intensitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesbangpol kedepannya maka diharapkan tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai seperti peralatan dan perlengkapan kantor maupun Gedung Kantor yang memadai sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi dapat lebih optimal.

Berikut table Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu dengan format Tabel T.C. 30 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	Memberi Pemahaman dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	260 Orang	1275 Orang	1300 Orang	1459 Orang	1550 Orang	1300 Orang	Target Tahun 2022 Tercapai, Tahun 2023 masih berjalan saat disusun rancangan awal Renja 2024
2.	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	Memberikan Pemahaman dan Pendidikan tentang Politik serta pentingnyamenggunakan hak suara dalam pemilihan kepada Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	400 Orang	425 Orang	550 Orang	450 Orang	600 Orang	550 Orang	Target Tahun 2022 Tercapai, Tahun 2023 masih berjalan saat disusun rancangan

										awal Renja 2024
3.	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Melakukan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas	Indeks Demokrasi Indonesia	30 Ormas	40 Ormas	50 Ormas	74 Ormas	120 Ormas	50 Ormas	Target Tahun 2022 Tercapai, Tahun 2023 masih berjalan saat disusun rancangan awal Renja 2023
4.	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Mendeteksi dini isu isu penyebab konflik dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peringkat 8	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 18	Peringkat 8	Peringkat 7	Target Tahun 2022 Tidak Tercapai, Tahun 2023 tercapai
5.	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	Memberi Pemahaman dan Pendidikan akan bahaya narkoba kepada masyarakat dan memberi pelatihan keahlian tenaga kerja (lifeskill) bagi mantan pecandu narkoba	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6,1 %	5,9 %	5,7%	6,5 %	6.5%	5,7%	Target Tahun 2022 Tidak Tercapai, Tahun 2023 Masih Berjalan

Berikut pula Tabel 2.2 Target dan Realisasi beserta strategi percepatannya dalam 4 tahun terakhir (Tahun 2019-2023).

No	Indikator Sasaran	Target				Realisasi				Strategi	Kegiatan Prioritas Pendukung Pencapaian Target
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
1	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	72.99	72.99	67,65	65,13	77,6	77,6	Keterbukaan Informasi Publik, Merekapitulasi secara berkala rekomendasi DPRD Sumut sebagai perbaikan indikator 22 dan menjalin kemitraan dengan instansi vertikal sesuai tupoksi masing masing	Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia Sumut
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	65	68	92		97	90,25	(Belum ada data)		Memberikan Pendidikan Masyarakat terkait deteksi dini Konflik Sosial, Serta berkoordinasi penuh dengan Tim aparat di Daerah	Percepatan Penanganan Konflik, Pembentukan PUSKOMIN dengan Kab/Kota,Koordinasi dengan Instansi Terakit Isu-isu Keamanan Daerah
No	Indikator Utama	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Strategi	Kegiatan Prioritas Pendukung Pencapaian Target
1	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	-	-	260	1275	1300 org	0 (efisiensi anggaran untuk covid)	1459 org	1550	Memberi Pemahaman dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat	Sosialisasi Revolusi Mental, Peringatan Hari Bela Negara, Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta Fasilitasi Forum Pembauran 2Kebangsaan
2	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	300	350	400	450	400 org	0 (efisiensi anggaran untuk covid)	450 org	600	Memberikan Pemahaman dan Pendidikan tentang Politik serta pentingnyamenggunakan hak suara dalam pemilihan kepada Masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik, Hibah Bantuan Parpol, Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi

											Indonesia Provsu, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Daerah
3	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	20	20	30	40 ormas	31	85	74	120 ormas	Melakukan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas	supervisi tim terpadu pengawasan Ormas di Provsu/Verifikasi Pendaftaran, Pendataan Ulang, Evaluasi dan Supervisi bantuan Dana Hibah Bagi Ormas dan Asistensi bagi ASN Kab/Kota Tentang Ormas, Hibah Ormas.
4	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	9	8	9	10	18	8	Mendeteksi dini isu isu penyebab konflik dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi	Melaksanakan PUSKOMIN, Fasilitasi FORKOPIMDA, Sosialisasi Cipta Kondisi kepada Masyarakat, Fasilitasi FKDM, dan Rapat koordinasi terkait Pemantauan Orang Asing dan Penanganan Konflik.
5	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	6.5	6.3	6.1	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	Memberi Pemahaman dan Pendidikan akan bahaya narkoba kepada masyarakat dan memberi pelatihan keahlian tenaga kerja (lifeskill) bagi mantan pecandu narkoba	Sosialisasi Bahaya Narkoba, Rapat koordinasi Tim P4GN, Pelatihan Lifeskill kepada mantan pecandu, Desa Bersinar, pemberian bantuan biaya rehabilitasi narkoba

											bagi keluarga tidak mampu
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Bakesbangpol Provsu adalah sebagai berikut :

1. Keragaman masyarakat Sumatera Utara baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga oleh karena itu diperlukan pemberdayaan kepada Forum - Forum Strategis yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), ForumPembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Pelestarian Budaya, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota, sehingga wajib menjadi perhatian kita agar selalu menjaga sinkronisasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
2. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada era globalisasi saat ini adalah berkaitan dengan penyetaraan gender, oleh karena itu Kesbangpol juga memperhatikan isu gender ini sebagai bagian dari penyusunan dokumen Perencanaan OPD, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kegiatan dengan menggunakan analisi gender didalamnya.
3. Ditengah peristiwa pendemi Covid 19 vaksin menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi virus Covid 19 yang telah ada di masyarakat. Hal ini menjadi dukungan kita bersama dalam bentuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus Covid 19 serta bagaimana hidup berdampingan dengan virus tersebut (*new normal*) di masyarakat.
4. Hasil Data BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BPS (Badan Pusat Stastistik), Sumatera Utara merupakan peringkat 1 (pertama) penggunaan Narkotika di Indonesia. Sebagai OPD yang membidangi program ketahanan ekonomi, sosial dan ekonomi, Bakesbangpol berkoordinasi dan bekerjasama dengan BNN dan tim Aparat serta OPD terkait keamanan lainnya berusaha meningkatkan pencegahan dan penanggulangan untuk menahal tingkat prevalensi pengguna Narkoba di Sumatera Utara.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditengah Pandemi Covid-19 dibangun optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal program prioritas nasional Presiden dibutuhkan pola pendekatan baru, cara kerja baru, inovasi baru salah satunya melalui pendekatan teknologi informasi, untuk itu ke depan cara kerja baru kita adalah melalui Teknologi Informasi yang terkoneksi di 33 Kab/Kota. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain sinkronisasi program dan kegiatan dan kemampuan sumberdaya manusia, hal ini berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah ini tentu saja tidak akan dapat berjalan maksimal jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk itu dibutuhkan dukungan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota melalui sinkronisasi program dan kegiatan di daerah antara lain melalui penguatan Regulasi di bidang Perencanaan dan Penganggaran dengan pencatuman urusan kesbangpol di dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Serta penguatan Kelembagaan kesbangpol melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas kita dihadapkan dalam berbagai macam persoalan bangsa dan negara yang harus kita tangani dengan baik sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, setidaknya ada 8 (delapan) isu isu strategis yang menjadi perhatian kita yang membutuhkan formulasi yang dimuat dalam program dan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
3. Terorisme dan radikalisme;
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
7. Kualitas demokrasi; dan
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan maka dari hasil isu isu strategis yang menjadi perhatian kita, maka efektifitas sasaran kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian terutama pada pencegahan dan penanggulangan pengguna Narkoba. Bakesbangpol membuat inovasi dengan menambahkan beberapa jenis kegiatan baru yaitu membuat pelatihan keterampilan lifeskill bagi mantan pecandu narkoba, pelatihan/konselor adiksi korban penyalahgunaan NAPZA, fasilitasi test urin bagi ASN dan Masyarakat serta Fasilitasi Biaya Rehabilitasi Narkoba untuk keluarga tidak mampu, serta yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Selain itu dalam peningkatan pencegahan konflik sosial Bakesbangpol kembali melaksanakan PUSKOMIN (Pusat komunikasi dan Informasi) untuk berkoordinasi dengan Tim Aparat Keamanan serta memfasilitasi pertemuan koordinasi FORKOPIMDA.

Selanjutnya perubahan jumlah Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dari Rp. 1.200,- menjadi Rp. 5.000,- per suara yang otomatis juga merubah jumlah struktur anggaran dibandingkan dari Rancangan awal RKPD.

Kegiatan Revolusi Mental yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang wajib kita teruskan ke tingkat Daerah juga menjadi salah satu kegiatan prioritas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang rinciannya terdiri atas Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Sosialisasi Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata, serta kegiatan Bela Negara.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sumatera Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	SAKIP BB	19.450.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	SAKIP BB	19.450.000.000	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	500.000.000	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	500.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	500.00.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	500.00.000	500.00.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	12.200.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	12.200.000.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%	11.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.000.000.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Orang	800.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	14 Orang	800.000.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	400.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol		5 kali	120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol		5 kali	120.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	5 kali	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	6 kali	120.000.000	

			Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	3.050.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	3.050.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	120.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	120.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan kantor yang disediakan	100%	800.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	800.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan kantor	100%	850.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	850.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	150.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100%	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kesbangpol	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 koran	30.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan	100%	1.100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	1.100.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.680.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.680.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	80.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya	100%	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	600.000.000	

			air dan listrik yang disediakan								
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	12 orang	950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	950.000.000	
6	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.900.000.000	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.900.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	10 unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	600.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	300.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	300.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 gedung	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	1.000.000.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1400 orang	6.550.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1400 orang	6.550.000.000	
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah dokumen program kerja dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	dokumen	3.500.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Program Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Dokumen	3.500.000.000	

			Kebangsaan yang disusun								
8	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Orang	3.500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Forum yang di fasilitasi	orang	3.500.000.000	
9	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan teknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	dokumen	2.000.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Peserta Perumusan Penyusunan Reaktualisasi Nilai nilai Pancasila	dokumen	2.000.000.000	
10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	orang	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Jumlah Kegiatan Revolusi Mental	orang	200.000.000	

			Kebangsaan yang disusun								
11	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	laporan	300.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan	laporan	300.000.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	1.286.670.483.602	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 orang	1.286.670.483.602	

12	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/peilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	1 dokumen	600.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Penyusunan Indeks Demokrasi Sumatera Utara dan Buku Pemetaan Politik Sumatera Utara	1 Dokumen	600.000.000	
13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/peilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	orang	1.284.070.483.602	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Sumatera Utara	orang	1.284.070.483.602	

14	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	laporan	1.200.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mendapatkan Pendidikan Politik	laporan	1.200.000.000	
15	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	Orang	800.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemilu dan Forum Komunikasi Dengan Partai Politik	Orang	800.000.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	40 Ormas	9.950.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	40 ormas	9.950.000.000	

16	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	Dokumen	350.000.000	Penyusunan Baha Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Peserta yang difasilitasi Bidang Ormas	50 Orang	350.000.000	
17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	Orang	9.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Ormas	40 ormas ; 40 angkatan	9.000.000.000	
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	laporan	9.000.0.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Frekuensi Monitoring dan Pelaporan Terkait Ormas	12 Bulan	9.000.0.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kesbangpol	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	270 Desa/Kelurahan	18.000.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kesbangpol	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	270 Desa/Kelurahan	18.000.000.000	

			Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya					Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya			
19	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	Dokumen	1.500.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	Dokumen	1.500.000.000	
20	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	2000 Orang	16.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Masyarakat dan Jumlah Peserta Sosialisasi Tatanan Kehidupan Baru dan Desa Bersih dari Narkoba	2000 Orang	16.000.000.000	
21	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan hasil monitoring , evaluasi dan	laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kesbangpol	Termonitornya kegiatan terkait Narkoba dan Forum yang terkait	laporan	500.000.000	

			pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegaha n penyalahgu naan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaa n di daerah yang disusun			Kepercayaan di Daera					
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8 peringk at	9.550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8 peringkat	9.550.000.000	

22	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Kesbangpol	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	2.000.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Kesbangpol	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	2.000.000.000	
23	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	dokumen	850.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kersjama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Tersedianya Informasi tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme	dokumen)	850.000.000	
24	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen program kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	dokumen	1.500.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	dokumen	1.500.000.000	

			Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun					Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			
25	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	laporan	4.000.00.000.000	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	4.000.00.000.000	
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitas Kelembagaan	Orang	3.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Kebijakandi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	Orang	3.000.000.000	

			bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun					Penanganan Konflik di Daerah			
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusu	Orang	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini kerjsama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	Orang	200.000.000	
					1.350.170.483.602					1.350.170.483.602	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 sd 2024, dan telah disusun Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dari RPJMN tersebut nantinya akan dilihat kaitannya dengan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam meningkatkan dukungan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terhadap prioritas pembangunan Nasional antara lain:

1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang Berkinerja Tinggi;
2. Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
3. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
4. Penguatan lembaga demokrasi
5. Penanganan konflik sosial

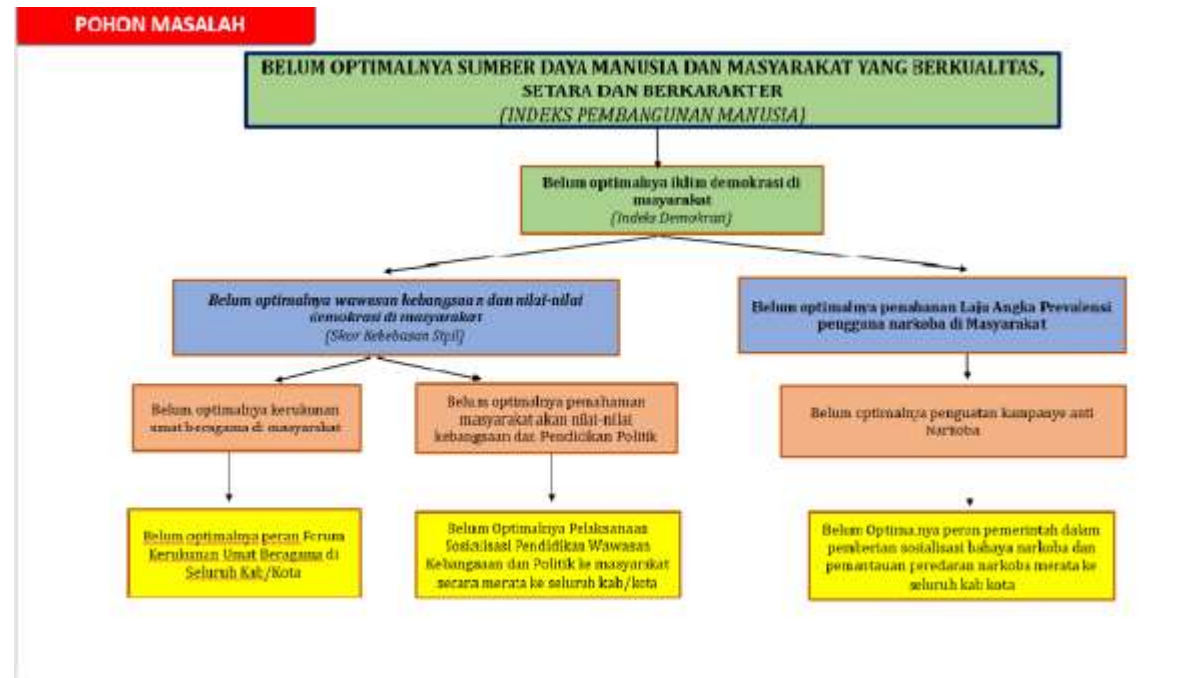
3.2 Tujuan dan Sasaran

Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2019– 2023, Untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026 dapat dijelaskan berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat serta pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat (Aspek Kebebasan)	Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental
			Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Politik
			Jumlah Ormas Yang Terbina dan Aktif
			Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Bahaya Narkobadan Terpantaunya Daerah di Kawasan Bahaya Narkoba	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba Menjadi Kawasan Waspada

POHON MASALAH BAKESBANGPOL PROVSU



➤ **SASARAN PERTAMA "MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMUT YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH"**

Dalam mendukung pencapaian Sasaran pertama ini terdapat 4 (dua) indikator didalamnya yakni : Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan, Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas, Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif dan Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi

❖ **Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan**

Indikator yang pertama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya Rasa Berbangsa dan Bernegara. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan diharapkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk itulah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara merasa perlu melakukan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pemahaman wawasan kebangsaan di tengah – tengah masyarakat Sumatera Utara yang pluralisme ini baik dari Suku, Agama, Ras maupun Golongan. Bentuk – bentuk kegiatan yang biasa dilakukan seperti Sosialisasi, Dialog maupun memberdayakan Forum yang ada. Pada tahun 2022 yang lalu terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Peringatan HUT Bela Negara.

Untuk kegiatan HUT Bela Negara dilaksanakan di Lapangan Asta Jl. Wiliam Iskandar No. 9 Medan dengan mengundang dari unsur TNI dan Polri, Organisasi Kemasyarakatan dan beberapa OPD di lingkungan Sumatera Utara. Pada kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi mental mengundang siswa-siswi SMA/SMK yang berjumlah 50 Orang yang dilaksanakan di Hotel Putra Mulia, Medan. Dalam mencapai indikator masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol juga melaksanakan beberapa kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan mengundang siswa-siswi SMA/SMK di lingkungan Sumatera Utara. Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu Sosialisasi Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan mengundang peserta dari unsur mahasiswa dari 11 Perguruan Tinggi di Sumatera Utara. Dengan tercapainya indikator ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan khususnya dilingkungan Sumatera Utara.

**Perbandingan Target IKU dengan realisasi Yang Ditetapkan Dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2022	Realisasi TA 2022	Presentase
Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	1275 Orang	1550 Orang	121 %

sebagaimana telah disebutkan diatas, yang menyebabkan tidak tercapainya target sebagaimana ditetapkan pada tahun 2020 adalah adanya larangan untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang dikarenakan pandemi covid – 19 masih berlangsung sampai bulan Desember 2020 yang lalu sehingga kegiatan yang tadinya bisa menghadirkan ribuan orang harus dibatasi dan dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi makna kegiatan dimaksud.

❖ **Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas**

Untuk Indikator yang kedua dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pelopor pemilih cerdas di Sumatera Utara sebagaimana khususnya masyarakat Sumatera Utara yang akan menyambut pesta demokrasi yaitu pemilu serentak tahun 2024. Dalam mencapai indikator diatas Badan Kebangpol melakukan beberpa kegiatan seperti Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan, Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu dengan Tema Optimalisasi Peran Kelola Partai Menuju Pilkada 2024, Sosialisasi Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat dan Pemilih dan PemulaRapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang disampaikan pada tabel berikut ini :

REKAPITULASI DATA KEGIATAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2022

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1.	Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	25 Oktober 2022	Hotel Tresya Kota Tanjungbalai	Pelajar dan Mahasiswa Kota Tanjungbalai	75 Orang
2.	Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	28 Oktober 2022	Singapore City Hotel Batu Bara Kab. Batu Bara	Pelajar dan Mahasiswa Kab. Batu Bara	75 Orang
3.	Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan	01 September 2022	Sitamiang Hotel Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan	1. Unsur PKK 2. Dharma Wanita 3. Organisasi Perempuan 4. ASN Perempuan	60 Orang
4.	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu dengan Tema Optimalisasi Peran Kelola Partai Menuju Pilkada 2024	03 Oktober 2022	Green Garden Hotel Berastagi	1. Kepala Badan / Kantor Kesbangpol se-Sumatera Utara 2. Sekretaris Bakesbangpol Provsu 3. Kabid Wasbang Bakesbangpol Provsu 4. Kabid Ketahanan Ekonomi dan Ormas Bakesbangpol Provsu 5. Kabid Wawasan Nasional Bakesbangpol Provsu 6. Kasubbag Umum Bakesbangpol Provsu 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Keuanagan Bakesbangpol Provsu 8. Analis Kebijakan Ahli Muda Perencanaan Bakesbangpol Provsu	60 Orang
5.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	18 Agustus 2022	Aula Tengku Rizal Nurdin Kota Medan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprovsu 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik 3. Kepada Bappeda Provsu 4. Kepala BPKAD Provsu 5. Inspektur Provsu 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 7. Kepala Bakesbangpol Provsu 8. Kepala Satpol-PP Provsu 9. Kepala Biro	150 Orang

				Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdaprovsu 10.Kepala Biro Hukum Setdaprovsu 11.Kepala Badan /Kantor Kesbangpol Kab/Kota se-Sumatera Utara 12.Kadis Dukcapil Kab/Kota se-Sumatera utara 13.KPU Kab/Kota se-Sumatera Utara 14.Bawaslu Kab/Kota se-Sumatera Utara	
6.	Sosialisasi Etika dan Budaya Politik bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula	25 Mei 2022	Asana Garden Siantar	Masyarakat terutama Pemilih Pemula	60 Orang
7.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	2 Desember 2022	Le Polonia Hotel & Coventional, Medan	1. Kesbangpol Kab/Kota 2. BPKAD Kab/Kota 3. Bappeda Kab/Kota	120 Orang

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2022	Realisasi TA 2022	Presentase
Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	425 Orang	600 Orang	141 %

Dari data tersebut, kita bisa melihat target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat sebagai pelopor pemilih cerdas telah sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan adanya masyarakat sebagai pelopor pemilih cerdas khususnya di Sumatera utara Kita dapat meningkatkan demokrasi dalam politik sebagaimana pada tahun 2024 mendatang dilaksanakannya Pesta Demokrasi.

❖ **Jumlah Pembinaan Ormas Aktif**

Indikator ini dimaksudkan untuk melihat berapa jumlah pembinaan ormas aktif setiap tahunnya di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ormas yang ada harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kesbangpol Daerah. Namun seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 maka ormas yang mendaftar sudah bisa mengajukan pendaftaran melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan untuk Pelaporan Ormas juga dipermudah. Disamping itu sebelum diberlakukannya Peraturan ini Perkumpulan dan Yayasan tidak termasuk kedalam kategori Ormas.

Selanjutnya sesuai Permendagri 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memantau keberadaan dan aktivitas Organisasi Masyarakat yang ada di wilayahnya. Untuk menjelaskan data Organisasi masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan pada table berikut :

Adapun untuk mencapai indikator tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan beberapa kegiatan seperti Sosialisasi Peraturan Terkait Ormas yang dilaksanakan di hotel Hermes pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dihadiri oleh 80 orang dari unsur Organisasi Kemasyarakatan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang aturan yang berlaku terhadap organisasi kemasyarakatan termasuk apakah organisasi itu memiliki dasar hukum atau nomor SK Pendaftaran dari Kemendagri maupun Kemenkumham. Kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu Verifikasi pendaftaran, pendataan ulang, evaluasi dan supervisi bantuan dana hibah bagi ormas dan asistensi bagi asn kab/kota tentang ormas yang dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama dua kali.

**Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2022	Realisasi TA 2022	Presentase
Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah pembinaan Ormas yang Aktif	40 Ormas	120 Ormas	300 %

dari data tersebut dapat disampaikan bahwa pada tahun 2022 yang lalu untuk data ormas yang ada di Badan Kesbangpol terdapat penambahan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan antusias masyarakat dalam berorganisasi masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. Dari data yang ada di Badan Kesbangpol pada tahun 2022 yang lalu ada 120 (Seratus Dua Puluh) Ormas yang telah dilakukan pembinaan kepada Ormas yang aktif di Sumatera Utara oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

❖ **Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi**

Dalam mencapai indikator tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan rapat penanganan konflik sosial di beberapa Kabupaten Kota seperti di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 April 2022 yang dihadiri oleh 50 orang peserta, di Kabupaten Karo pada tanggal 26 Agustus 2022 yang dihadiri oleh 120 orang peserta, kemudian pada 16 September 2022 di Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh 100 orang peserta dan di Kota Medan pada tanggal 8 Desember 2022 dengan dihadiri oleh 100 orang peserta. Adapun kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 dapat dijelaskan pada table berikut ini :

No.	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
Rapat Penggalangan Cipta Kondisi			
1.	19 Agustus 2022	Sinagpore City Hotel, Kab. Batubara	130 Orang
2.	23 September 2022	Hotel Grand Kanaya, Kota Medan	25 Orang
3.	7 Oktober 2022	Restoran JM Bariani Hause, Kota Medan	25 orang
4.	14 Oktober 2022	Restoran JM Bariani Hause, Kota Medan	30 orang
5.	21 Oktober 2022	Hotel Grandhika Setia Budi, Kota Medan	50 orang
6.	28 Oktober 2022	Hotel Putra Mulia, Kota Medan	50 orang
Rapat Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing			
1.	13 Oktober 2022	Hotel Grandhika Setia Budi, Kota Medan	40 Orang
2.	17 November 2022	Hotel Putra Mulia, Kota Medan	60 Orang
Rapat Kerja Bidang Kewaspadaan Daerah			
1.	29-30 November 2022	Le Polonia Hotel Convention, Kota Medan	130 Orang
Rapat Penanganan Konflik Sosial			
1.	13 April 2022	Wings Hotel Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang	50 Orang
2.	26 Agustus 2022	Hotel Sibayak International, Kabupaten Karo	120 Orang

3.	16 September 2022	Aksari Hotel, Kabupaten Simalungun	100 Orang
4.	8 Desember 2022	Hotel Emerald, Kota Medan	100 Orang
Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			
1.	22 November 2022	Green Garden Hotel, Kabupaten Karo	100 Orang
Rapat Pencegahan Bahaya Radikalisme dan Terorisme			
1.	15 November 2022	Batavia Hotel, Kota Pematang Siantar	50 Orang

Untuk Penilaian Laporan Rencana Aksi masing – masing daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, penilaian ini dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya untuk menilai tahun anggaran sebelumnya. Penyusunan Laporan Rencana Aksi ini dilaksanakan setiap Triwulan dan disampaikan ke Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melihat sejauh mana koordinasi dan penanganan konflik yang dilaksanakan di daerah sehingga konflik yang ada tidak meluas dan meresahkan masyarakat. Untuk Sumatera Utara pada tahun 2017 berada pada peringkat 9 Nasional dan 2018 meningkat menjadi peringkat 8, akan tetapi pada tahun 2019 berada di peringkat 10 Nasional. Pada tahun 2021 mendapat peringkat 18 Nasional dan pada tahun 2022 meningkat dengan peringkat 15 untuk penilaian B.08 sementara berkaitan dengan Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 2015, dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan. Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota, dilaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku ketua tim terpadu penanganan konflik nasional tingkat nasional.

Pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial merupakan kegiatan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus-menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota. Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan program penanganan konflik sosial ini, Pemerintah Pusat memberikan reward (Penghargaan/Apresiasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Raihan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada periode B-08 Tahun Sebelumnya, dimana saat itu Sumatera Utara berada pada posisi dua belas tingkat Nasional dengan persentase capaian 80%. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dari 4 rencana aksi yang dinilai. Adapun rencana aksi penanganan konflik sosial yang dilaporkan mencakup rencana pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

Salah Faktor terjadinya penurunan Peringkat Nasional Laporan RAD Periode Target B.08 Tahun 2022 dari 4 Rencana Aksi yang dinilai, 3 Rencana Aksi mendekati target dan hanya 1 Rencana Aksi melebihi target dengan Perseentase Capaian 77,25 %.

PERINGKAT NASIONAL LAPORAN RAD PERIODE TARGET B.08 TAHUN 2022

PERINGKAT	PROVINSI	TOTAL NILAI (%)	PERINGKAT	PROVINSI	TOTAL NILAI (%)
1	D.I.Yogyakarta	115	18	Maluku Utara	76.25
2	Riau	115	19	Kalimantan Barat	70.5
3	Aceh	113.5	20	Jambi	68.75
4	Jawa Timur	112.5	21	Kepulauan Riau	65
5	Sulawesi Barat	112	22	Bali	65
6	Lampung	106.5	23	Sulawesi Tengah	52.5
7	Jawa Tengah	105	24	Sulawesi Utara	51
8	DKI Jakarta	96.5	25	Kep. Bangka Belitung	46.25
9	Sulawesi Selatan	95.75	26	Maluku	43.75
10	Bengkulu	93.75	27	Banten	38.75
11	Sumatera Barat	90	28	Sumatera Selatan	25
12	Papua Barat	90	29	Papua	25
13	Kalimantan Tengah	85	30	Kalimantan Utara	15
14	Kalimantan Selatan	82.75	31	Kalimantan Timur	10
15	Sumatera Utara	77.25	32	Gorontalo	10
16	NTB	77.25	33	Sulawesi Tenggara	10
17	Jawa Barat	77	34	NTT	0

PENILAIAN LAPORAN RAD PERIODE TARGET B.08 TAHUN 2022

No	Provinsi	Penilaian					Jumlah RA	Total	Capaian (%)
		Tidak Kirim Data Dukung/ Tidak Sesuai	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai	Mendekati Target	Sesuai Target	Melampaui Target			
		0%	(1-49%)	(50-74%)	(75-100%)	(101-120%)			
1	ACEH	0	0	0	1	3	4	454	113,5
2	SUMATERA UTARA	0	0	3	0	1	4	309	77,25
3	RIAU	0	0	0	1	3	4	460	115
4	KEPULAUAN RIAU	0	0	3	1	0	4	260	65
5	JAMBI	0	1	2	1	0	4	275	68,75
6	SUMATERA BARAT	0	1	0	2	1	4	360	90
7	SUMATERA SELATAN	3	0	0	1	0	4	100	25
8	LAMPUNG	0	0	0	2	2	4	426	106,5
9	BENGKULU	0	0	0	3	1	4	375	93,75
10	KEP. BANGKA BELITUNG	2	0	0	2	0	4	185	46,25
11	BANTEN	1	1	1	1	0	4	155	38,75
12	JAWA BARAT	0	0	1	3	0	4	308	77
13	DKI JAKARTA	0	0	0	3	1	4	386	96,5
14	JAWA TENGAH	0	0	0	3	1	4	420	105
15	D.I.YOGYAKARTA	0	0	0	1	3	4	460	115
16	JAWA TIMUR	0	0	0	1	3	4	450	112,5
17	BALI	0	2	0	3	0	5	325	65
18	NTB	0	0	2	2	0	4	309	77,25
19	NTT	0	0	0	0	0	4	0	0

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2022	Realisasi TA 2022	Presentase
Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8	15 (B.08)	-

➤ **SASARAN KEDUA "LAJU ANGKA PREVELENSI PENGGUNA NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA"**

Untuk Sasaran kedua ini juga terdapat 1 (satu) indikator yang mendukung pencapaiannya yakni : Menahan Laju Angka Prevelensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan member Pendidikan Bahaya Narkoba.

❖ **Menahan Laju Angka Prevelensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara.**

Pada indikator ini diharapkan agar persentase laju angka pravelensi di Sumatera Utara dapat menurun dari sebelumnya. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sebanyak 14 kali diberbagai kabupaten/Kota di lingkungan Sumatera Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan Desa Bersinar di 38 Kabupaten/Kota dilingkungan Sumatera Utara. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkoba ditengah masyarakat khususnya di lingkungan Sumatera Utara. Pembangunan Kelurahan/Desa Bersinar sebanyak 300 Kelurahan/Desa Bersinar di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sudah terealisasi 38 titik selesai dilaksanakan dengan jangka waktu 24 Oktober – 13 Desember 2022. Berkaitan dengan kegiatan Desa Bersinar dapat dilihat dari table berikut :

Daftar Pelaksanaan Desa/Kelurahan Bersinar Badan Kesbangpol 2022

1	25 Oktober 2022	Aula Kantor Kel. Bandar Utama Tebing Tinggi
2	25 Oktober 2022	Aula Kantor Kel.Lalang Tebing Tinggi
3	26 Oktober 2022	Aula Desa Jam ur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
4	27 Oktober 2022	Jl Siak (Hall Badminton Kel Martoba Kec. Siantar Utara
5	27 Oktober 2022	Jl. Melati Ujung No 53 Kel Simarito Kota Pematang Siantar
6	28 Oktober 2022	Jl.Tunut Panombe Pengulu, Kel Nagori Bosar Kab. Simalungun
7	28 Oktober 2022	Huta I Semangat Baris Kel Nagori Silau Mahala Kab. Simalungun
8	02 November 22	Halaman Desa Cempaka Kec. Hinai Kab. Langkat
9	02 November 22	Dusun Mawar Jalan Pulau Banyak Ds Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura
10	02 November 22	Jl. Batu Putih No 19 Kel Pahlawan Kec. Medan Perjuangan
11	03 November 22	Aula Kantor Desa Serapuh Asli Kec. Tj.Pura Kabupaten Langkat
12	03 November 22	Jl Deli No1 Kel Belawan Kec. Medan Belawan
13	03 November 22	Bagas Godang Kel Kota Siantar Panyabungan Kab Mandailing Natal
14	03 November 22	Jl. Paku Gg Rukun Lk. 3 Kel Tanah Enam ratus Kec Medan Marelan
15	05 November 22	Depan Rumah Kepala Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina

16	07 November 22	Balai Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab.Langkat
17	07 November 22	Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kab. Langkat
18	07 November 22	Aula Kantor Lurah Kota Matsun IV Kecamatan Medan Area
19	07 November 22	Joglo JAwa Jln Taufan Kel. Sei Rengas Kec.Kota Kisaran Barat KAb. Asahan
20	08 November 22	Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
21	08 November 22	Aula Kantor Lurah Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas
22	08 November 22	Jl. Milala Gg. Cempaka Kel Kampung
23	08 November 22	Jln. Jamin Ginting Tropis Cacat Veteran Lorong 1 Desa Sumber Mufakat
24	08 November 22	Joglo JAwa Jln Taufan Kel. Sei Rengas Kec.Kota Kisaran Barat KAb. Asahan
25	09 November 22	Aula Keluahan Kota Bangun Kec.Medan Deli
26	09 November 22	Aula Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan Area
27	14 November 22	Jl Desa Perlis Kecamatan Berandan Perlis
28	14 November 22	di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu
29	15 November 22	Aula Kantor Kelurahan Bahagia Kel Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan
30	15 November 22	Aula Kantor Kelurahan Bahari Kel Belawan Bahari Kec Belawan Kota Medan
31	17 November 22	Jl Lau Kawar (Jambur Desa Naman) Kec Naman Teran Kab Karo
32	17 November 22	Jln Rumah Kuta (Jambur Desa payung) Kecamatan Payung Kab. Karo
33	22 November 22	Jl Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
34	22 November 22	di Balai Desa Laut Dendang Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
35	5 Desember 2022	Jln. Pasar I No 4 Kel Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
36	5 Desember 2022	Kantor Lurah Helvetia Jl Balai Desa Nomor 10 Kel Helvetia
37	13 Desember 2022	Aula Kantor Lurah Damai Binjai Utara
38	13 Desember 2022	Aula Kantor Lurah Cengkeh Turi Kel.Cengkeh Binjai Utara

Dalam menahan laju angka prevelensi narkoba di Sumatera Utara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengundang ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Untuk memperingati Hari Anti Narkoba Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan HANI di di Aula Tengku Nurdin dengan dihadiri oleh 700 Orang dari unsur masyarakat biasa, mahasiswa dan siswa di Sumatera Utara. Dengan kegiatan yang telah dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat menahan laju angka prevelensi Narkoba yang akan dikeluarkan oleh BNN mengingat bahwa Sumatera Utara menjadi peringkat satu sebagai provinsi dengan peredaran narkoba terbesar di Indonesia. untuk kegiatan yang telah dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menahan laju angka prevelensi Narkoba di Sumatera Utara dalam diliat dalam table berikut ini :

Table Daftar Pelaksanaan Kegiatan Bahaya Narkoba

Sosialisasi Bahaya Narkoba				
No.	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Jenis Peserta	Jumlah Peserta
1.	12 Februari 2022	Desa karang rejo gg dokter zulbahry kec. Stabat langkat	Masyarakat	100 Orang
2.	12 Maret 2022	Aula Yayasan Insan Mulia, Jln Proklamasi Lingkungan XI Wismorejo	Masyarakat	100 Orang
3.	12 April	Aula Yayasan Pendidikan Pesantren Al Uswah Jl. Binjai Kuala Lk. IV Kel Bela Rakyat	Masyarakat	50 orang
4.	13 April 2022	Aula Kantor Camat Kualuh Selatan, Kab. Labuhan batu Utara	Masyarakat	50 orang
5.	13 April 2022	Aula Ridho Yaman Kantor Bupati Labuhan Batu Utara	Masyarakat	50 orang
6.	19 April 2022	Hotel Hermez Medan	Masyarakat	50 orang
7.	20 April 2022	Gedung PKK Binjai	Masyarakat	50 orang
8.	24 Mei 2022	Balai Data Lt. 4 Kantor Bupati Toba Jl. Sutomo Pagar Batu Balige	Masyarakat	50 orang

9.	16 Juni 2022	Cindelaras Kania (Deli Serdang)	Masyarakat	50 orang
10.	23 Juni 2022	Kantor Camat Tebing Tinggi	Masyarakat	50 orang
11.	29 Juni 2022	Hotel Hermes Medan	Masyarakat	50 orang
12.	15 Juli 2022	Samosir	Masyarakat	50 orang
13.	6 Agustus 2022	Hotel Alam Langkat	Masyarakat	50 orang
14.	13 September 22	Hotel Hermez Medan	Masyarakat	50 orang
Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
1.	23 Februari 2022	Hotel Four Point	ASN	50 Orang
Memperingati Hari Anti Narkoba (HANI)				
1.	27 Juni 2022	Aula Tengku Rizal Nurdin	Masyarakat, Mahasiswa dan siswa	700 Orang

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2022	Realisasi TA 2022	Presentase
Laju Angka Prevalensi Narkotika di Sumatera Utara	Menahan Laju Angka Prevelensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan member Pendidikan Bahaya Narkoba	5,9 %	6,5 %	-

Untuk melihat sejauh mana pencapaian target maupun perbandingan antara dokumen Renstra dengan Target Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bakesbangpol Provsu setiap Indikator disetiap tahunnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tahun anggaran 2024 diusulkan 6 (Enam) Program dengan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dan total pagu yang diusulkan sebesar Rp 677.949.519.584,- Dari 6 (Enam) Program terdapat 1 (satu) Program Rutin dan 5 (lima) Program Utama, secara ringkas untuk rencana kerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	1.802.564.278	17
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	5.749.999.901	5
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	617.734.835.237	4
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.449.999.100	3
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	11.972.561.070	3
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	8.055.458.143	6
Total		677.949.519.584	39

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini meliputi kegiatan rutin penunjang pegawai dan pekerjaan kantor yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelakasaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah

- Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)
- Pembentukan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) sesuai Perpres No. 13 Tahun 2021
- Sosialisasi 4 Konsensus dasar bagi masyarakat
- Sosialisasi Reaktualisasi Nilai nilai Pancasila
- Forum Dialog Penguatan Nilai nilai Kebangsaan Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda
- Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Aparat, Kesbangpol dan Forum Forum Strategis dan Masyarakat Kab/Kota Se Sumut

- Sosialisasi Revolusi Mental Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
- Pelaksanaan Hari Bela Negara serta Peningkatan Kesadaran Bela Negara
- Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Fasilitasi Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan yang diusulkan Tahun 2024 adalah :

- Orientasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara
- Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada
- Pendidikan Politik bagi Kader-Kader PKK dan Organisasi Wanita
- Pendidikan Politik kepada Masyarakat Kab/Kota
- Verifikasi PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kab/Kota se Sumatera Utara
- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu
- Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol
- Rapat koordinasi Persiapan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
- Orientasi dan Bimtek Tim Pemantau Perkembangan Politik Kab/Kota dalam rangka Pilkada Serentak
- Sosialisasi Etika dan Budaya Politik di provsu
- Forum Komunikasi Parpol dengan Kesbangpol Provsu
- Pemetaan Perkembangan Politik di Sumut

- Rapat koordinasi Pemilu/Pilpres Kab/Kota
- Sosialisasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Rapat Koordinasi DPR RI, DPRD SU, DPD DAPIL SUMUT dan Parpol.
- Hibah KPU dan Bawaslu

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2024 adalah :

- Monitoring dan Evaluasi Ormas di Lingkungan Pemprovsu
- Rapat Asistensi Pemberdayaan Ormas bagi Aparatur Kesbangpol Kab/Kota
- Sosialisasi Peraturan Perundangan Ormas
- Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Rapat Koordinasi/Silaturahmi Ormas dengan Gubernur
- Hibah bantuan ormas yang sudah mengusulkan proposal yaitu Aisyiyah Sumut, DPD Majelis Buddhayana Indonesia Sumut, Himpunan Ahli Rias Pengantin Melati Sumut, IKA BKPRMI Sumut, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), Lembaga Survey Sumut, Nadhlatul Ulama Sumut, Parsadaan Pomparan Tiga Sinaga Dohot Boru, Persatuan Batak Islam Sumut, Persatuan Persaudaraan Putera Solo Sumut dan Persatuan Wredatama RI Sumut.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pada Tahun 2024 merupakan lanjutan penambahan Program ini menjadi salah satu Indikator Utama Bakesbangpol dalam mendukung Misi Gubernur Nomor 4 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Narkoba dan menjadi salah Satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) mengingat Sumatera Utara merupakan peringkat 1 pengguna

Narkoba di Indonesia, dengan indikator Menahan Laju Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang diusulkan Tahun 2023 adalah :

- Pelaksanaan DESA BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)
- Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
- Fasilitasi Forum Pelestarian Budaya
- Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Kab/Kota
- Penyuluhan Tatanan Kehidupan Baru Covid 19
- Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19
- Pelatihan/Konselor Adiksi Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Rapat Koordinasi P4GN
- Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Pelatihan Kepada Mantan Pecandu Narkoba (*Lifeskill*)
- Bantuan Biaya Rehabilitasi Narkoba Untuk Keluarga Tidak Mampu

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan yang diusulkan Tahun 2024 adalah :

- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Penanganan Konflik Sosial
- Pusat Komunikasi dan Informasi
- Tim Kewaspadaan Dini
- Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
- Penggalangan Cipta Kondisi
- Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sesuai yang diusulkan dalam dokumen Rencana Kerja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 26 (Dua Puluh Enam) Sub kegiatan untuk tahun 2024 mendatang. Dari keseluruhan Program ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Untuk melihat lebih rinci nama – nama Program, kegiatan dan Pagu Anggaran pada masing – masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel T 4.1 pada dokumen Rencana Kerja ini.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana 2025		Catatan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	Provinsi Sumatera Utara	100 %	20.986.666.133,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		17.699.531.962,00	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Provinsi Sumatera Utara	7 dokumen	1.802.564.278,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Provinsi Sumatera Utara	100%	8.869.555.320,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		10.000.000.000,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Orang	684.614.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		800.000.000,00	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumatera Utara	3 dokumen	463.520.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		436.531.962,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sumatera Utara	5 kali	390.769.150,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		85.000.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Provinsi Sumatera Utara	100%	99.267.692,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		100.000.000,00	

		disediakan							
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%	2.736.871.462,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		700.000.000,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan kantor	Provinsi Sumatera Utara	100%	566.957.593,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		700.000.000,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%	169.994.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		100.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%	32.244.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		30.000.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan	Provinsi Sumatera Utara	100%	961.904.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		1.000.000.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumatera Utara	100%	15.000.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		48.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	100%	599.476.116,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	Provinsi Sumatera Utara	12 orang	1.067.737.662,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		800.000.000,00	
6	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Provinsi Sumatera Utara	10 unit	1.287.114.200,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		600.000.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dpelihara	Provinsi Sumatera	100%	246.936.160,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		300.000.000,00	

			Utara						
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sumatera Utara	1 gedung	992.140.500,00			1.000.000.000,00	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Provinsi Sumatera Utara	1400 orang	5.749.999.901,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		6.500.000.000,00	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	dokumen	217.771.450,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
2	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Orang	3.431.491.451,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		3.500.000.000,00	
3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	dokumen	461.939.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		2.000.000.000,00	

4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	orang	1.638.798.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		300.000.000,00	
5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	laporan	0,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		200.000.000,00	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	700 Orang	617.734.835.237,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		57.000.000.000,00	
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantau Situasi Politik Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	350.394.600,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		600.000.000,00	

2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantau Situasi Politik Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	orang	613.425.936.537,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		55.000.000.000,00	
3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	laporan	1.539.836.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		900.000.000,00	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Orang	2.418.668.100,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	Provinsi Sumatera Utara	40 Ormas	13.449.999.100,00			8.800.000.000,00	

1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Dokumen	12.450.000.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		300.000.000,00	
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Orang	816.399.100,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		8.000.000.000,00	
3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	laporan	183.600.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Provinsi Sumatera Utara	270 Desa/Kelurahan	11.972.561.070,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		15.600.000.000,00	
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Dokumen	1.350.000.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		1.000.000.000,00	

2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	2000 Orang	9.554.433.990,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		14.000.000.000,00	
3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	laporan	1.068.127.080,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		600.000.000,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Provinsi Sumatera Utara	8 peringkat	8.055.458.143,00			6.668.000.000,00	
1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	Dokumen	2.009.510.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		1.500.000.000,00	

2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	dokumen	700.000.000,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		450.000.000,00	
3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen program kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	dokumen	622.074.400,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		500.000.000,00	
4	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	laporan	1.412.427.300,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		2.000.000.000,00	

5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Orang	2.835.336.751,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		2.000.000.000,00	
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	Provinsi Sumatera Utara	Orang	476.109.692,00	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)		218.000.000,00	
	TOTAL				677.949.519.584,00			112.267.531.962,00	

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan tahun pertama atas pelaksanaan rencana strategis Provinsi Sumatera Utara periode 2024 - 2026. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Sumatera Utara Tahun 2024, disamping itu untuk bahan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan kedepannya.

Melalui dokumen ini juga diharapkan Penetapan Tujuan, Saran serta Indikator Knerja Utama yang merupakan upaya dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dan terintegritas sehingga bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish.

Ir. ARDAN NOOR, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19660926 199303 1 010